

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diawali dengan terjadinya krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 yang dipicu oleh krisis nilai tukar, yang ditandai dengan likuiditas 16 Bank Swasta pada tanggal 1 November 1997, mengakibatkan merosotnya kinerja perekonomian nasional yang menimbulkan efek krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang. Hal tersebut terjadi karena diterapkannya metode bunga yang diharapkan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, namun dalam kenyataannya perbankan yang menerapkan metode bunga tersebut menimbulkan dampak negatif berupa ketidak stabilan ekonomi, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang, menumpuknya hutang negara, dan macetnya roda perekonomian nasional. Dengan demikian, perlu adanya pemikiran baru untuk melakukan perombakan metode dasar ekonomi agar dapat mengatasi permasalahan yang timbul serta mengarahkan metode ekonomi yang baru kepada tujuan keadilan, kesamaan, dan kemajuan. (Edy Wibowo, 2005:vii)

Krisis tersebut menimbulkan efek yang berkepanjangan, sehingga perlu adanya suatu lembaga keuangan, khususnya perbankan yang dapat mengatasi permasalahan krisis finansial yang telah terjadi. Sehingga harus diadakan alternatif yang dapat mengembangkan kegiatan usaha bank berdasarkan pada prinsip syariah.

Lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip syariat Islam, merupakan metode baru yang dijadikan alternatif atau solusi untuk mengatasi

permasalahan yang timbul dalam ekonomi. Dimana lembaga keuangan ini beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, yang didalamnya menyangkut tata cara bermuamalah yang jauh dari unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maisir*, *haram*, dan *zalim*. (Zubairi Hasan, 2009:31)

Konsep teoritis mengenai Bank Syariah muncul pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil, penerapan sistem bagi hasil, sebagai inti bisnis lembaga keuangan Islam pun telah ada sejak tahun 1940-an yaitu dalam upaya mengelola dana jemaah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia. Namun secara kelembagaan bank Islam yang pertama kali berdiri ialah *Islamic Rular Bank* yang didirikan di daerah Myt Ghamr oleh Dr. Ahmed El-Najar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir, walaupun pada akhirnya operasionalnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan *Central Bank of Egypt*. Namun karena persoalan politik, pada tahun 1971 di Mesir berhasil didirikan kembali bank Islam dengan nama *Nasser Social Bank*. Sedangkan bank Islam yang bersifat swasta adalah *Dubai Islamic Bank*, yang didirikan pada tahun 1975. Pada tahun 1977 berdiri dua bank Islam dengan nama *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, selain itu pada tahun 1977 pemerintah Kuwait juga mendirikan *Kuwait Finance House*. (Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010:277-278)

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Sehingga pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Kegiatan operasional perbankan

syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalah (BMI). Operasional perbankan syariah tersebut didasarkan pada UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No.10 Tahun 1998. (Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi’I Antonio, 1992:83).

Ide pendirian BMI berasal dari MUI pada lokakarya “Bunga Bank Dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990, yang dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah itu dibentuklah sebuah tim sebagai *steering committee* yang mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di tanah air yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz, kemudian telah dikenal dengan sebuah tim MUI. Untuk membentuk kelancaran tim MUI, terutama untuk masalah-masalah legal, maka dibentuklah tim Hukum ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen A. Perwataatmadja. (Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi’I Antonio, 1992:84)

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Pasal 1 angka 2 UU No. 21 Tahun 2008)

Mengenai pengelolaan Perbankan Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Perbankan Syariah menentukan bahwa Perbankan Syariah

wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional, dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut mempertegas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. (Zubairi Hasan, 2009:111-112).

Bank Syariah Bukopin Jl. RE Martadinata No.142 Bandung merupakan salah satu cabang Bank Syariah dari kantor pusat Bank Syariah Bukopin yang beralamat di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat. Bank Syariah Bukopin menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*Funding*), menyalurkan (*landing*) kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, dan pelayanan jasa. Dalam produk penghimpunan dana Bank Syariah Bukopin antaranya menawarkan tabungan rencana yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dimana bank dapat mengelola dana nasabah dan dari keuntungan yang diperoleh akan dibagihasilkan antara nasabah dengan bank sesuai dengan persentase nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Pasal 1 ayat 21 UU No. 21 Tahun 2008)

Tabungan rencana ditawarkan dengan dua manfaat pilihan yaitu pendidikan dan multiguna. Pendidikan yang ditawarkan yaitu untuk membantu nasabah dalam merencanakan kelangsungan pendidikan bagi putra/ putrinya yang sesuai dengan jenjang pendidikan, sedangkan multiguna ditawarkan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan ketersediaan dana untuk mewujudkan rencana di masa yang akan datang maupun untuk keperluan lain. Selain itu manfaat yang diberikan Bank Syariah Bukopin terhadap tabungan rencana ini yaitu asuransi jiwa.

Berikut jumlah nasabah tabungan rencana Bank Syariah Bukopin Bandung pada tahun 2010 dan 2011.

Table 1.1
Jumlah Nasabah Tabungan Rencana
PT. Bank Syariah Bukopin Bandung

No	Bulan	Jumlah nasabah Tahun 2010	Jumlah nasabah Tahun 2011
1	Januari	202	143
2	Pebruari	195	144
3	Maret	188	146
4	April	182	151
5	Mei	167	149
6	Juni	160	146
7	Juli	152	143
8	Agustus	150	147
9	September	144	144
10	Oktober	144	149
11	Nopember	141	154
12	Desember	130	159
JUMLAH		1955	1775

Sumber: Hasil Rekapitulasi Tabungan Rencana Bank Syariah Bukopin Bandung.

Berdasarkan keterangan dari *AO marketing funding* Bank Syariah Bukopin, tabungan rencana merupakan tabungan pendidikan dan multiguna yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi dimana ketika seorang nasabah menabung di tabungan rencana maka nasabah tersebut akan langsung terproteksi asuransi.

Perbankan dan Perasuransian merupakan lembaga yang memiliki aturan dan diawasi oleh otoritas yang berbeda, dengan demikian untuk melindungi stabilitas dan peran positif masing-masing sektor dalam peningkatan kesehatan sistem keuangan, maka tidak diperbolehkan adanya inter-sektor, (M. Umer Chapra, Tariqullah Khan, 2008:23). Selain itu akad merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam produk Perbankan Syariah, sehingga bank syariah perlu hati-hati dalam menentukan akad suatu produk, mengingat adanya beberapa ketentuan akad yang dilarang untuk dilakukan, salah satunya ialah akad *two in one*.

Memandang banyak hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai Tabungan Rencana, maka penulis mengambil judul **“PELAKSANAAN TABUNGAN RENCANA DI BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?
2. Bagaimana regulasi dan aspek legalitas produk tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tabungan rencana Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?
2. Untuk mengetahui bagaimana regulasi dan aspek legalitas produk tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap tabungan rencana Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung?

E. Kerangka Berfikir

1. Akad

Menurut Daeng Naja (2011:19) yang mengutip dari Az-Zarqa, dalam pandangan syara, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing, harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikatkan diri.

Ala ‘Eddin Khafora dalam *Transaction in Islam Law*, menguraikan tentang kata *Aqd*, mengenai definisi *contract* dalam hukum Islam:

1. *The word ‘aqd (contract) in the Arabis language originally means tying tightly, is in tying a rope. Arabs also used the word to speak about firm belief or determination.*
2. *the word contract in Islamic jurisprudential usage means an engagement and agreement between two person in a legally accepted, impactful and binding manner.* (Daeng Naja, 2011:18)

Firman Allah S.W.T. dalam surat An-Nahl ayat 91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿٩١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaknya”. (Al-Jumanatul ‘Ali Al-Qur’an dan Terjemah, 2005:107)

Berikut beberapa rukun dan syarat akad yang dikemukakan oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah (2008:46-50), yaitu:

1. Rukun akad

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- d. *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. Hal yang harus diperhatikan dalam *shighat* ialah harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*, dan menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* harus saling *ridha*.

2. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, ialah:

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- b. Yang dijadikan objek dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu di izinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
- e. Akad dapat memberika faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan amanah.

- f. *Ijab* itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi *qabul*. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum *qabul*, maka batallah ijabnya.
- g. *Ijab* dan *qabul* harus bersambung sehingga bila seseorang yang beijab sudah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam (2006:66) *fiqh muamalah* membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah/ mu'awadah*.

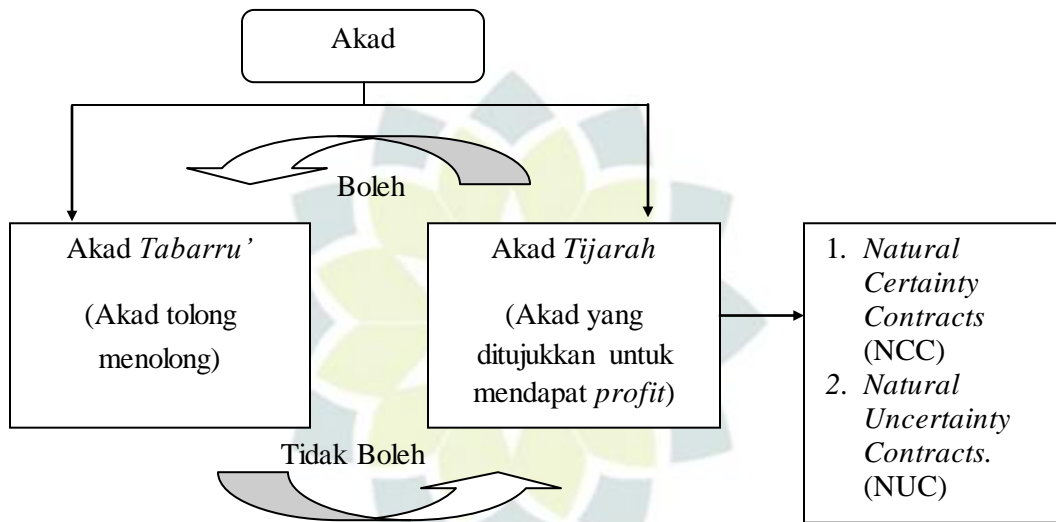
1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pada hakikatnya akad *tabarru'* tidak digunakan untuk transaksi bisnis yang mencari keuntungan komersial. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun atau mengambil laba kepada pihak lain. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'*.

2. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/ mu'awadah* (*compensaional contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, sehingga akad ini bersifat komersial.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* di bagi menjadi dua kelompok, yakni *natural certainty contracts* dan *natural uncertainty contracts*.



Gambar 1.1 Pembagian Akad Bank Syariah dalam Fiqh Muamalah.

Natural certainty contracts (NCC) dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimiliki, karena aset tersebut merupakan objek pertukaran, baik barang atau jasa. Pertukaran tersebut harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Dalam kontrak ini masing-masing pihak berdiri sendiri tidak ada pertanggungans resiko bersama. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Sedangkan dalam *natural uncertainty contracts*, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama

untuk mendapatkan keuntungan. Kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya, yang termasuk dalam kontrak ini adalah *musyarakah*, *mudharabah*, dan lain-lain.

Sebagaimana dalam kaidah hukum, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Qur'an dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. (Adiwarman A. Karim, 2006: 29)

Adiwarman A. Karim (2006:29-49) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi dilakukan, yaitu:

1. Haram zatnya

Dalam hal ini sebuah transaksi terlarang, dilihat dari objeknya baik barang atau jasa. Walaupun akadnya sah tetap transaksi ini diharamkan karena objek yang di transaksikannya haram.

2. Haram selain zatnya

- a. Melanggar prinsip "*an taradin minkum*"

Tadlis (penipuan), *tadlis* dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.

- b. Melanggar prinsip "*la tazhlimuna wa la tuzhlamun*"

- 1) *Taghrir/gharar* (ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi);

- 2) Rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*);

- 3) Rekayasa pasar (dalam *demand bai' najasy*);
- 4) *Riba*;
- 5) *Maysir* (perjudian);
- 6) *Risywah* (suap menyuap).

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah atau tidak lengkap akadnya, apabila terjadi salah satu faktor berikut:

a. Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi. Pada umumnya rukun dalam *muamalah iqtishadiyah* ada tiga yaitu, pelaku, objek, *ijab-qabul*, apabila ketiga rukun di atas tidak terpenuhi maka transaksi menjadi batal. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun.

b. *Ta'alluq*

Ta'alluq terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad perama tergantung pada akad kedua.

c. *Two in one*

Two in one adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidak pastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor ini terpenuhi yaitu, objek, pelaku, dan jangka waktunya sama. Bila salah satu dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka *two in one* tidak terjadi, dengan demikian akad menjadi sah.

Fiqh muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai macam kegiatan dan hal-hal yang terpenting dalam kinerja operasional perbankan syariah. Menurut Atang Abd. Hakim dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Perbankan Syariah* (2011:160) Azas kerjasama merupakan salah satu azas yang diberlakukan *fiqh muamalah* dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah. Kerjasama bisa dalam bentuk kepemilikan dan bisa juga dalam bentuk akad (kontrak). *Syirkah* dalam bentuk akad adalah kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko dibagi bersama.

2. Pengembangan Produk

Penghimpunan (*funding*), penyaluran (*landing*), dan pelayanan jasa (*service*) merupakan usaha Bank Syariah dalam melayani dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Zubairi Hasan (2009:88) kegiatan usaha Perbankan Syariah diterjemahkan menjadi produk Perbankan Syariah, dengan demikian Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI No. 10/17/PBI/2008 mengenai produk Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kata produk berasal dari bahasa Inggris *product* yang berarti "sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya". Bentuk kerja dari kata *product*, yaitu *produce*, merupakan serapan dari bahasa latin *prōdūce(re)*, yang berarti (untuk) memimpin atau membawa sesuatu untuk maju.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pengertian_produk. Diakses 20-7-2012)

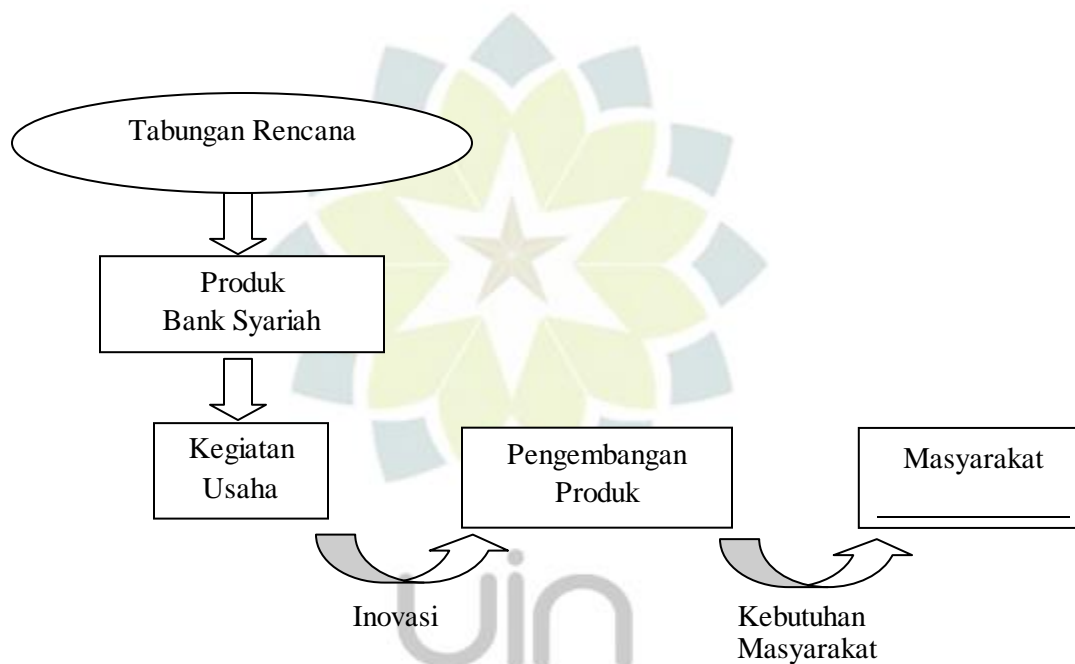
Kasmir dalam bukunya Pemasaran Bank yang mengutip dari Kotler dan Amstrong (1996:274) produk adalah : *“A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption and that might satisfy a want or need”*. Artinya produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.

Produk bank adalah produk yang dikeluarkan bank baik disisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa bank sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh bank sebagai agen pemasaran (Pasal 1 angka 5 PBI No. 10/17/PBI/2008).

Menurut Edi Wibowo dan Untung Hendy Widodo dalam bukunya Mengapa Memilih Bank Syariah yang mengutip dari Zainal Arifin (1999:198) menyatakan bahwa produk bank tidak dapat dilepaskan dari metode operasi bank yang pendekatannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mempelajari ketentuan syariah tentang metode ekonomi Islam atau melihat mekanisme yang lazim berkembang dalam operasional perbankan konvensional dan kemudian menetapkan ketentuan hukum Islam yang dapat diimplementasikan ke dalam mekanisme tersebut.

Suatu bank syariah dapat berkembang pesat apabila bank syariah tersebut mampu mengembangkan produknya, produk yang mampu menarik masyarakat banyak. Inovasi produk menjadi salah satu kunci perbankan syariah untuk lebih kompetitif dan berkembang dengan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

karena keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan tergantung kepada kemampuan bank-bank syariah dalam menyajikan produk yang menarik, kompetitif dan memberikan kemudahan transaksi, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (<http://kadandia.blogspot.com/2012/04/hambatan-perkembangan-perbankan-syariah.html>. Diakses 20-7-2012)



Gambar 1.2 Alur Pengembangan Produk.

Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi bank-bank syari'ah, karena inovasi memiliki peran penting ditengah pasar yang kompetitif, oleh sebab itu industri perbankan syari'ah harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi baru dalam membuat produk yang variasi dan kombinasinya, sehingga mampu menambah daya tarik bank syari'ah dan meningkatkan dinamisme perbankan syari'ah dalam menghadapi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Sukardi, (2009:157) penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakter objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Metode penelitian ini menggambarkan tentang aplikasi tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Syaodih N. (2006:220) mengatakan bahwa, observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. (Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009:103). Observasi digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung, mengenai rumusan masalah yang penulis angkat, dimana penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yang bertempat di Bank Syariah Bukopin Bandung, untuk mendapatkan gambaran secara nyata dari objek yang diteliti.

b. Wawancara

Sudjana (2000:234) mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya

(*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*). (Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009:130). Wawancara digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dan sebagai studi pendahuluan untuk menemukan rumusan masalah yang akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan Ibu Tri Muliarti bagian *marketing Funding* Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, Bapak Lukman Hakim bagian Menejer Kantor Perwakilan BI Wilayah VI-Jabar dan Banten, dan Bapak Edi Cahyadi bagian *sales executive manager* Panin Life Syariah Cabang Bandung.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis, atau mencari dasar pijakan/ fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara. (Sukardi, 2009:33). Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan.

3. Jenis Data Penelitian

Dilihat dari tujuan dan metode/ tekniknya dalam buku Cik Hasan Bisri (2004:272) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana sekumpulan data yang

diperoleh dari penelitian merupakan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang diidentifikasi pada tujuan yang telah ditetapkan.

Masalah yang akan di bahas oleh penulis yaitu mengenai pelaksanaan tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, regulasi dan aspek legalitas produk tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung, Serta tinjauan fiqh muamalah terhadap tabungan rencana Bank Syariah Bukopin Cabang Bandung.

4. Sumber Data

Dilihat dari setingnya, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. (Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009:103)

Sumber penelitian dalam memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan di atas adalah:

- a. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu wawancara dengan bagian *marketing Funding* Bank Syari'ah Bukopin Cabang Bandung, bagian Menejer Kantor Perwakilan BI Wilayah VI-Jabar dan Banten, dan bagian *sales executive manager* Panin Life Syariah Cabang Bandung.

- b. Sumber data sekunder diperoleh dari data penunjang yang berkaitan dengan penelitian, referensi buku, skripsi, catatan perkuliahan, dan internet.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting karena melalui analisis data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari penelitian yang dilakukannya. (Djam'an Satori, Aan Komariah, 2009:97)

Analisis data ini merupakan penguraian data melalui tahapan, kategorisasi, dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang kualitatif. Setelah semua data terkumpul dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya mengelola dan menganalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai aplikasi tabungan rencana di Bank Syariah Bukopin.
- b. Mengklasifikasikan dan menelaah data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
- c. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.